

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada era digital, banyak aspek kehidupan manusia telah mengalami perubahan besar, termasuk cara pemerintah beroperasi. E-government adalah implementasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pelayanan publik untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pemerintahan (Heeks, 2005). E-government dianggap sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pelayanan publik, memungkinkan pemerintah desa untuk memberikan layanan yang lebih cepat dan akurat kepada masyarakat. Selain itu, dianggap bahwa penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dapat meningkatkan akses seluruh stakeholder ke layanan pemerintah. (Gupta dkk., 2008).

Dalam prosesnya, kebijakan menetapkan bahwa orang harus menggunakan teknologi informasi untuk mendukung pemerintahan yang baik untuk memulai e-government. Menurut Konferensi Dunia tentang Tata Kelola UNDP, goodgovernance adalah proses pemerintahan yang baik yang mencakup partisipasi kebijakan dalam berbagai aktivitas sosial, ekonomi, politik, serta pemanfaatan sumber daya, keuangan, dan manusia untuk kepentingan umum dengan menerapkan keadilan, pemerataan, kesetaraan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.(Ardiyati, 2022)

Layanan e-government muncul sebagai tanggapan atas tuntutan masyarakat untuk pemerintahan yang baik di era globalisasi. Penggunaan teknologi informasi dan telekomunikasi untuk menciptakan administrasi pemerintahan yang efektif dan menyediakan layanan publik yang transparan dan memuaskan dikenal sebagai e-government. (Imania & Haryani, 2021) Singkatnya, salah satu tujuan e-government adalah untuk memberikan layanan publik yang baik. Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah harus berkomitmen serius untuk menerapkan birokrasi yang efektif.

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan landasan hukum utama bagi transformasi digital pemerintahan di Indonesia. Perpres ini hadir untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efisien, efektif, transparan, dan akuntabel melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). SPBE mencakup berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan, mulai dari tata kelola, manajemen, arsitektur, layanan, infrastruktur, aplikasi, data dan informasi, keamanan, hingga sumber daya manusia. Dengan adanya SPBE, diharapkan pelayanan publik dapat ditingkatkan kualitasnya, partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan dapat diperluas, dan proses bisnis pemerintahan dapat diotomatisasi. Adapun beberapa faktor yang berperan penting dalam mensukseskan penyelenggaraan e-government, yakni ketersediaan sumber daya manusia, kelembagaan, infrastruktur, serta regulasi yang komprehensif. (Imania & Haryani, 2021)

Implementasi SPBE membutuhkan koordinasi yang kuat antar instansi pemerintah, investasi yang memadai dalam infrastruktur dan SDM, serta komitmen untuk perubahan budaya kerja. Arsitektur SPBE menjadi panduan

dalam mengintegrasikan berbagai sistem informasi dan data pemerintahan, sehingga tercipta interoperabilitas dan kolaborasi yang lebih baik. Keamanan siber juga menjadi perhatian utama dalam SPBE, mengingat potensi ancaman yang semakin kompleks (Imania & Haryani, 2021). Keberhasilan SPBE akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah untuk mengatasi tantangan-tantangan ini dan memastikan bahwa TIK digunakan secara efektif dan bertanggung jawab untuk melayani masyarakat.

Secara teoritis, pemerintah harus melakukan tiga fungsi pelayanan: pelayanan lingkungan, pelayanan pengembangan dan pelayanan perlindungan. Pelayanan ini berbeda tergantung pada siapa yang menerimanya, apakah itu individu atau kelompok. E-Government dianggap sebagai inovasi yang meningkatkan sistem pemerintahan karena memungkinkan layanan yang lebih efisien dan berkualitas tinggi melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (Universitas Brawijaya Malang & Yunas, 2020).

Supaya pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dapat dilaksanakan dengan baik, hal pertama yang harus dilakukan ialah menetapkan sebuah program untuk meningkatkan kemampuan dan potensi sumber daya manusia saat ini. Pengembangan ini harus dilakukan melalui manajemen khusus yang terencana dan saling berhubungan. Pengembangan SDM di pemerintahan desa menjadi kunci untuk mengoptimalkan implementasi e-government. SDM yang berkualitas akan mampu mengoperasikan teknologi dengan baik, memahami kebutuhan masyarakat, dan menyediakan layanan publik yang lebih baik. Pengembangan sumber daya manusia itu sendiri terkait erat dengan ketersediaan peluang pengembangan pembelajaran dan pelaksanaan pelatihan. Beberapa aspek

pengembangan pembelajaran termasuk perencanaan, organisasi, penggerak dan pengendalian atau evaluasi. Tujuan dari pengembangan ini adalah untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dengan menggunakan teknik moral, teoritis, dan konseptual. Ini akan memungkinkan peningkatan prestasi kerja yang optimal dan mencapai hasil yang optimal. (Udayana, 2024).

Sudah jelas bahwa kepemimpinan sangat penting karena menunjukkan bagaimana seorang pemimpin mengelola dan menerapkan sumber daya yang ada. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan kebijakan dan dukungan yang diperlukan dalam implementasi e-government. Kebijakan yang jelas dan dukungan finansial serta teknis sangat diperlukan untuk mendorong desa-desa, dalam mengadopsi teknologi informasi. Tanpa dukungan tersebut, upaya pengembangan SDM dan implementasi e-government dapat terhambat. (Bertot dkk., 2016a)

Sebagai produk dari lembaga pemerintahan, saat ini berbagai layanan publik berinovasi melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (Jansen, 2012). Implementasi e-government di Desa menjadi sangat penting dalam konteks pengembangan sumber daya manusia (SDM) pemerintahan desa, terutama di era society 5.0 yang menekankan integrasi antara teknologi digital dalam kehidupan sosial. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, desa dapat mengelola data kependudukan, perencanaan pembangunan, serta komunikasi dengan warga secara lebih efektif. Hal ini sejalan dengan tujuan society 5.0 yang ingin menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan berdaya saing melalui inovasi digital. (Bertot dkk., 2016b)

Karena teknologi digital sangat populer, sekarang menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari manusia. Konsep masyarakat 5.0 mengatakan bahwa orang harus menggunakan berbagai teknologi untuk menjalani hidup yang baik (Sugiono, 2021). Konsep ini juga menjadi dasar bagi proses transaksi online antara pemerintah dan masyarakat (Duriat dkk., t.t.). Di era digital, tata kelola sumber daya manusia (SDM) menghadapi banyak tantangan. Untuk mengurangi era industri 5.0, setiap individu, keluarga, pemerintah, masyarakat, termasuk dunia pendidikan dan korporasi harus meningkatkan kemampuan sumber daya manusianya. Kendala utama dalam manajemen sumber daya manusia di era digital adalah perubahan metodologi kerja dan lingkungan kerja. (Muhaimin, 2024)

Dalam konteks ini, e-government berperan penting dalam memfasilitasi integrasi teknologi dalam kehidupan masyarakat, termasuk di tingkat desa. Desa Pegayaman, sebagai salah satu desa di Indonesia, perlu memanfaatkan konsep ini untuk meningkatkan pelayanan publik dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) pemerintahan desa. Secara demografis, desa ini dihuni oleh masyarakat dengan mayoritas etnis Bali, yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan adat istiadat. Jumlah penduduk Desa Pegayaman bervariasi, dengan mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani, pedagang, serta pekerja di sektor pariwisata. Struktur usia penduduk juga menunjukkan proporsi yang seimbang antara usia produktif dan non-produktif, yang berkontribusi pada dinamika sosial dan ekonomi desa. Meskipun potensi e-government sangat besar, namun tantangan dalam implementasinya tetap ada. Kesenjangan digital, rendahnya literasi teknologi di kalangan aparatur desa, serta keterbatasan infrastruktur

menjadi hambatan yang harus dihadapi (Bertot et al., 2016). Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana Desa Pegayaman dapat mengatasi tantangan ini melalui pengembangan SDM yang berkapasitas.

Namun, penerapan e-governemnt di Desa Pegayaman juga menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi dan rendahnya tingkat literasi digital di kalangan perangkat desa dan masyarakat. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pelatihan dan pengembangan kapsitas SDM yang berkelanjutan agar mereka dapat memanfaatkan teknologi dengan optimal. Literasi digital masyarakat adalah faktor penting dalam keberhasilan implementasi e-government. Masyarakat yang memiliki pemahaman yang baik tentang teknologi informasi akan lebih mudah mengakses layanan publik yang disediakan melalui platform digital.(Chow dkk., 1975) Oleh karena itu, program-program peningkatan literasi digital perlu diadakan di Desa Pegayaman untuk memastikan bahwa masyarakat dapat memanfaatkan teknologi dengan maksimal. Dengan potensi demografis yang ada, Desa Pegayaman memiliki peluang besar untuk mengembangkan program-program pemberdayaan masyarakat yang dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan penduduk, terutama dalam menghadapi era modernisasi dan digitalisasi.

Dalam konteks pemerintahan, Desa Pegayaman menghadapi tantangan dalam akses terhadap layanan publik dalam mengakses Sistem Informasi Desa (SID). Meskipun kebijakan dari pemerintah pusat telah dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program, implementasi di tingkat desa sering kali terhambat oleh kurangnya infrastruktur digital dan pemahaman masyarakat tentang prosedur pengurusan. Oleh karena itu,

pengembangan e-government diharapkan dapat mempermudah akses layanan publik, di mana masyarakat dapat melakukan pengurusan secara online, sehingga mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan.

Dalam konteks globalisasi, pemerintah desa perlu memperkuat infrastruktur yang ada, baik fisik maupun digital. Peningkatan infrastruktur teknologi informasi menjadi krusial untuk mendukung implementasi e-government, yang mencakup penyediaan akses internet yang memadai dan pelatihan untuk SDM pemerintahan desa. Dengan infrastruktur yang baik, pemerintah dapat lebih efektif dalam memberikan layanan kepada masyarakat, serta mendorong partisipasi aktif mereka dalam program-program pemerintah (Vereinte Nationen, 2016).

Penanganan yang proaktif dalam pengembangan infrastruktur dan peningkatan kapasitas SDM di Desa Pegayaman dapat menciptakan ekosistem yang mendukung pencapaian tujuan Society 5.0, di mana teknologi dan masyarakat berkolaborasi untuk menciptakan kesejahteraan bersama.

Evaluasi terhadap implementasi e-government di Desa Pegayaman perlu dilakukan untuk mengidentifikasi keberhasilan dan tantangan yang dihadapi. Dengan melakukan evaluasi, pemerintah desa dapat merumuskan strategi yang lebih baik untuk meningkatkan pelayanan publik melalui teknologi. Penerapan e-government dapat memfasilitasi pelatihan online, seminar, dan workshop, sehingga pegawai pemerintahan desa dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru dengan lebih mudah. Keterlibatan masyarakat dalam proses e-government sangat penting untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Melalui partisipasi aktif, masyarakat dapat

memberikan umpan balik yang berguna dalam pengembangan layanan. Oleh karena itu, Desa Pegayaman perlu menciptakan saluran komunikasi yang efektif antara pemerintah desa dan masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana implementasi e-government di Desa Pegayaman dapat berkontribusi terhadap pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pemerintahan desa dalam menghadapi tantangan di era Society 5.0?

1.3 Tujuan

Mengkaji implementasi E-Government di Desa Pegayaman, dengan menyoroti infrastruktur, kebijakan, dan proses yang diterapkan, serta mengidentifikasi tantangan dalam pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) guna meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan kompetensi aparatur desa.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian dapat memperkaya pemahaman tentang hubungan antara teknologi dan pengembangan SDM dalam konteks pemerintahan desa, serta memberikan perspektif baru mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi pegawai di era digital. Serta dapat menjelaskan bagaimana konsep Society 5.0 terintegrasi dalam praktik pemerintahan desa, khususnya dalam penggunaan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan efisiensi administrasi.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian dapat digunakan untuk merancang program pelatihan bagi pegawai pemerintah desa yang berfokus pada penggunaan teknologi informasi,

sehingga meningkatkan keterampilan dan kompetensi SDM. Dengan mengidentifikasi tantangan dalam implementasi e-government, hal ini dapat memberikan solusi praktis untuk mengatasi kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam mengembangkan SDM dan layanan publik.